

**PANDANGAN TERHADAP PEMERINTAH DALAM KARYA SASTRA
(Studi Wacana Kritis Berbasis Korpus)**

Ahmad Fadly

Universitas Muhammadiyah Jakarta

Jalan KH. Ahmad Dahlan Cirendeu-Ciputat, Tangerang Selatan 15419, Indonesia

ahmadfadly2901@gmail.com

ABSTRAK

Polarisasi media menyebabkan tindakan yang mengarah pada disintegrasi bangsa. Kerangka pikir bangsa membedakan produk tulisan secara oposisi. Dalam berita (*hardnews*) lebih mudah diidentifikasi oposisi itu. Namun, tidak mudah membedakannya pada karya sastra. Penelitian ini menggunakan karya sastra (cerpen) yang diterbitkan oleh koran-koran pada 2016 dan 2017. Dalam pengolahannya, peneliti ini mengoperasikan perangkat lunak AntConc 4.3.3w untuk mengungkap pandangan pengarang terhadap pemerintah dan juga rakyat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah dipandang sebagai obyek yang negatif karena tindakannya berseberangan dengan rakyat dan kurangnya kordinasi antara pusat dan daerah sehingga memiliki oposisi. Akan tetapi, pemerintah yang direpresentasikan oleh kata *presiden*, *gubernur*, *walikota*, dan *bupati* dipandang dari segi personal, bukan sebagai institusi pemerintah sehingga komunikasi interpersonal lebih dititikberatkan. Sementara itu, masyarakat dipandang sebagai obyek yang memiliki pola pikir dan nilai kolektif serta kebersamaan yang tinggi, sedangkan rakyat dipandang sebagai oposisi terhadap pemerintah, klasifikasi sosial, dan simbol perjuangan serta perlawanan.

Kata kunci : *pandangan terhadap pemerintah, studi wacana kritis, korpus*

I. PENDAHULUAN

Saat ini polarisasi media —baik cetak maupun elektronik— sangat terasa. Bahkan kondisi itu dapat memengaruhi masyarakat dan berpotensi memecah belah mereka. Demonstrasi yang terjadi pada 21 Februari 2017 dipandang oleh beberapa media sebagai bentuk “perjuangan”. Namun di sisi

lain, sebagaimana temuan Al Fajri, banyak media yang mendelegitimasinya dengan menyatakan sebagai tindakan kontraproduktif dan cenderung menguntungkan kelompok teroris. (Al Fajri, 2018: 705).

Kenyataan tersebut membuat netralitas dan obyektivitas media semakin dipertanyakan. Pemberitaan yang

dilakukan menguatkan bahwa banyak media yang partisan. Kondisi itu tentu dapat menjadi revolusi sosial, ketika masyarakat dapat dipengaruhi oleh media yang tidak berimbang. Akibatnya, persatuan bangsa menjadi cita-cita yang semakin membumbung tinggi. Lebih dari itu, disintegrasi bangsa menjadi ancaman yang semakin dekat.

Sebagaimana ciri khas pemberitaan, kelugasan makna melekat pada bahasa yang digunakan, terlebih untuk kategori berita *hard news*. Pembaca dapat mengidentifikasi sekaligus menganalisis netralitas media. Oleh karena itu, mereka memosisikan satu media dan media lain berdasarkan propaganda yang digunakan. Meskipun demikian, bahasa pada karya sastra yang dipublikasikan di pelbagai media menyulitkan pembaca untuk mengenali maksud di balik narasi yang buat oleh pengarangnya.

Tersiratnya makna pada karya sastra memudahkan pengaruh pengarang mengenai sasarannya (pembaca). Selain itu, dalam narasi terkandung fungsi hiburan (*entertainment*) yang dapat dijadikan tujuan untuk membacanya. Padahal karya sastra dapat dijadikan sebagai alat propaganda, bahkan provokasi yang efektif. Lebih dari itu,

karya sastra merupakan wacana, yang tentu saja dapat membentuk dan mengubah dunia. (Gee, 1999; Johnstone, 2002; Jorgensen dan Phillips, 2002).

Untuk itu, penelitian ini berupaya menyingkap pandangan (pengarang) terhadap pemerintah dalam karya mereka. Di samping itu, penelitian ini juga mengungkap perspektif mereka terhadap masyarakat (rakyat Indonesia).

Dalam penelitian ini, ancangan Studi Wacana Kritis (SWK) berbasis korpus digunakan karena sisi linguistik sangat tepat guna diterapkan untuk membongkar makna yang tersembunyi/tersirat. Adapun SWK adalah jenis penelitian wacana yang mengkaji cara penyalahgunaan kekuatan sosial, dominasi, dan ketidakadilan yang dimunculkan melalui teks dan percakapan dalam konteks sosial politik. (Van Dijk, 2001: 353)

SWK dibedakan dengan analisis wacana. Dalam analisis wacana, peneliti secara obyektif mengurai wacana tanpa adanya *pretense* dan maksud untuk berpihak pada teks. Akan tetapi, dalam SWK peneliti mempunyai tanggung jawab untuk mengatasi ketimpangan dan kesenjangan sosial (Van Dijk 1996; Billig 2003; Haryatmoko 2017).

II. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini mengkaji sejauh mana pandangan pengarang terhadap pemerintah tercermin dalam karya sastra, khususnya cerpen yang dimuat pada koran-koran yang diterbitkan pada 2016 dan 2017. Secara teknis, pandangan itu diungkap menggunakan perangkat lunak (*software*) AntConc 4.3.3w untuk mengidentifikasi kolokasi dan menunjukkan baris konkordansinya.

Pada operasinya, perangkat AntConc 4.3.3w difungsikan dengan memasukkan data cerpen-cerpen yang diterbitkan pada 2016 dan 2017. Setelah itu, peneliti ini mengetikkan kata kunci *pemerintah, negara, presiden, gubernur, walikota, bupati, rakyat, dan masyarakat*, di dalam kolom pencarian (*search term*) untuk melihat kolokasi dan konkordansinya. Kata *negara* digunakan sebagai kata kunci karena kata itu dapat digunakan sebagai representasi pemerintah. Meskipun demikian, peneliti ini memilah kata itu berdasarkan konteks kalimatnya mengingat bahwa kata tersebut dapat pula dimaknai sebagai cakupan wilayah formal yang tidak berposisi dengan rakyat. Berdasarkan pilihan kata yang bersanding (berkolokasi) dengan beberapa kata kunci tersebut terungkap

pandangan pengarang terhadap pemerintah sekaligus rakyat.

Adapun korpus disusun berdasarkan cerpen-cerpen yang dimuat di media massa cetak yang diterbitkan pada 2016 dan 2017. Koran yang dijadikan sumber data pada 2016 sebanyak 5, yaitu Jawa Pos, Kompas, Koran Tempo, Media Indonesia, dan Suara Merdeka. Sementara itu, peneliti ini menggunakan 8 koran sebagai sumber data, yaitu Jawa Pos, Kedaulatan Rakyat, Kompas, Koran Tempo, Media Indonesia, Pikiran Rakyat, Suara Merdeka, dan Tribun Jabar.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini mengungkap pandangan pengarang terhadap pemerintah. Selain itu, analisis dilakukan juga untuk melihat pandangan pengarang terhadap rakyat atau masyarakat Indonesia. Hasil yang ditemukan dalam penelitian ini dikelompokkan ke dalam dua sisi. Sisi pertama merupakan pandangan pengarang terhadap pemerintah, sedangkan sisi kedua terfokus pada pandangan pengarang terhadap rakyat atau masyarakat.

Pada kata pemerintah ditemukan 94 kali (*hits*). Berdasarkan data, pengarang mencitrakan pemerintah sebagai suatu

obyek yang negatif karena melakukan tindakan yang bertolak belakang dengan kepentingan warga atau rakyatnya. Ini terlihat dari pernyataan tokoh di dalamnya:

mengambil laptopnya, lalu menyalakannya. Pemerintah brengsek, kata Driani

karena kalau tak terawat sekian tahun pemerintah akan mengambil alih pemilikannya

Meskipun demikian, pemerintah dipandang memiliki oposisi yang dapat mengancam kedudukannya. Ini tampak pada data berikut.

(Negara Islam Indonesia), dan akan menjatuhkan Pemerintah Indonesia, menjadikan Indonesia sebagai

Kondisi itu diperparah dengan tidak adanya koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pandangan itu terlihat pada data berikut.

kabut asap, serta menjadikannya bencana nasional. Pemerintah pusat dan daerah saling menyalahkan

karena tidak ada yang merasa bersalah. Kedua pemerintah itu

menyalahkan perusahaan-perusahaan

Meskipun demikian, pengarang meyakinkan pembaca (masyarakat) bahwa pemerintah mencarikan solusi atas permasalahan yang dihadapi dan melakukan yang terbaik untuk rakyatnya. Ini tercermin dalam data berikut.

Akan dibangun kilang minyak di sini. Nanti pemerintah akan mencarikan tempat baru untuk seluruh warga

Percayalah, pemerintah tak akan menyengsarakan rakyatnya.

Untuk itu, pengarang menganggap bahwa pemerintah perlu didukung oleh warga/rakyatnya. Anggapan ini tampak pada data berikut.

Demi menunjang usaha pemerintah untuk meningkatkan ekspor, saya harus

Adapun berdasarkan kolokasi, ditunjukkan bahwa kata *pemerintah* paling sering bersanding dengan kata *Zoja* (yang merupakan nama Kabupaten), *winning*, dan *tin* dengan 13.12889

Kata *negara* ditemukan 189 kali (*hits*). Pengarang memandang *negara* (yang merupakan representasi dari

pemerintah) sebagai obyek yang negatif pula. Sebab, negara dianggap melakukan pengabaian hak-hak rakyat dan bahkan bersembunyi atas perbuatannya itu. Ini tampak pada data berikut.

Russel mendengus. Negara ini sudah sinting

Toleransi terhadap pengabaian hak-hak rakyatnya. Negara bersembunyi dan menyembunyikan diri,

Meskipun demikian, negara dipandang sebagai suatu konstruksi yang terancam oleh oposisinya, baik dari dalam (internal) ataupun luar (eksternal). Kenyataan itu terlihat pada data berikut.

Masuknya orang asing ke negara yang kau lindungi

terlibat gerakan yang ingin menggulingkan negara

Aku dicurigai berpotensi mengacaukan negara. Oh! Sungguh benar, apa yang Engkau

Tindakan teror yang belakangan mengancam negara. Semula, aku minta diberhentikan dari satuan

Dari segi kolokasi dinyatakan bahwa kata yang paling banyak

bersanding dengan kata *negara* ialah kata *lindungi*, *liberal*, dan *hikmat* dengan status 13.12123. Temuan ini relevan dengan data yang ditinjau berdasarkan konkordansi atau konteks kalimat yang menyatakan bahwa negara menghadapi ancaman sehingga perlu dilindungi.

Kata *presiden* muncul 59 hits. Pengarang lebih menempatkan presiden pada sosok individu daripada institusi negara. Kesan yang dibangun menunjukkan bahwa presiden dipandang dari sisi komunikasi interpersonalnya kepada orang lain.

Kau tahu Tuan Presiden yang sedang duduk di hadapanmu sekarang

di luar pagar istana negara, menanti presiden berkenan menghampiri mereka.

Kehadiran Kiai Bisri diharap akan mengundang presiden untuk turun dari istana negara

Dari sisi kolokasi terlihat bahwa kata *presiden* paling banyak bersanding dengan kata *wakilnya*, *uzi* (jenis senapan yang digunakan oleh Presiden Obama), dan *redi* dengan 13.80083.

Kata *gubernur* muncul 38 kali. Pengarang dipandang sebagai sebuah

jabatan yang pantas dijadikan cita-cita karena wewenang dan kekuasaannya sehingga dapat lebih leluasa dalam melakukan tindakan, baik negatif maupun positif. Selain itu, gubernur dianggap sebagai jabatan yang masih terikat dengan partai pengusung sehingga praktik kolusi sangat rentan terjadi. Kondisi ini tampak pada data berikut.

ia bercita-cita jadi bupati bahkan gubernur karena dengan menjadi kepala daerah ia

para penunggang unta yang sedang menghujat gubernur. Mengapa belum dibunuh?

Polisi Satu menjadi Brigadir Polisi Anumerta. Gubernur menjanjikan beasiswa pada anak Hendo

Dia berani karena gubernur yang satu partai, mendukungnya.

Dari aspek kolokasi tidak tampak relevansi dengan temuan di atas karena kata yang paling sering bersanding dengan kata gubernur ialah kata *yee*, *wajarlah*, dan *tjarda* (Gubernur Jenderal A.W.L Tjarda van Starckenborgh) dengan status frekuensi 14.43555.

Kata *walikota* muncul 16 kali. Walikota dipandang sebagai jabatan yang

perlu mengeluarkan banyak modal untuk mendudukinya. Kondisi ini terungkap pada data berikut.

Kalah mencalonkan diri sebagai wakil walikota ibu menanggung begitu banyak hutang

Adapun dari segi kolokasi tidak tampak relevansinya dengan temuan tersebut karena kata paling sering bersanding dengan kata walikota ialah *vlugt* dengan status frekuensi 15.68347, lalu *tandasnya* dan *dicopot* dengan 14.68347. Meskipun demikian, kata *dicopot* berhubungan dengan temuan tersebut karena menunjukkan bahwawalikota merupakan jabatan yang secara hierarkis di bawah beberapa jabatan lain sehingga posisinya rentan dengan pencopotan.

Kata *bupati* muncul 21 kali. Pengarang memandang bupati sebagai posisi yang strategis karena sangat dekat dengan masyarakat kabupaten yang umumnya terdiri atas pedesaan. Oleh karena itu, jabatan itu mempunyai peluang untuk mengembangkan muatan lokal daerahnya. Namun, kedudukan itu juga memiliki potensi untuk melakukan kecurangan yang terkait dengan pengelolaan daerah. Kondisi itu tampak pada data berikut.

permainan tradisional. Berkat arahan bapak bupati pulalah jenis-jenis permainan semacam godak

punya celah mengungkap pembalakan kayu. Akibatnya bupati kami dipanggil ke Jakarta

Dari segi kolokasi terlihat bahwa kata bupati paling sering bersanding dengan kata *petahana*, *penyokong*, *pentolannya* dengan status frekuensi 15.29116. Kata *petahana* menunjukkan bahwa posisi bupati sangat besar peluangnya untuk dipertahankan karena sangat dekat dengan masyarakat desa yang memiliki rasa kebersamaan yang tinggi.

Kata *masyarakat* muncul 82 kali. Pengarang memandang masyarakat sebagai obyek yang bersifat komunal serta memiliki kebersamaan yang kuat sehingga dijadikan memiliki pola pikir dan nilai yang kolektif serta homogen. Kenyataan ini tampak pada data berikut.

Dia juga yang meminta masyarakat agar tanahnya dijual

yang melakukan perbuatan tercela, hingga akhirnya masyarakat menghakimimu dengan gosip nyinyir

Di pengadilan niaga aku akan berhadapan dengan masyarakat lokal yang memandang

percaya diriku begitu besar menghadapi gugatan masyarakat lokal itu. Namun, semuanya buyar

karena melanggar nilai moral di masyarakat. Aku percaya Herman tidak begitu

Meskipun demikian, masyarakat tertentu dipandang sebagai bagian dari dinamika sosial yang dapat bergerak, bergeser, bahkan berubah atas pengaruh dari kelompok lain sehingga memiliki karakteristik yang bertolak belakang dari ciri awal. Ini tampak pada data berikut.

Panggillah itu ekses dari masyarakat yang egoistik, hedonistik

Masyarakat juga dijadikan sebagai obyek yang mudah untuk 'dikontrol' atau dikendalikan oleh opini tertentu akibat homogenitas pola pikir. Selain itu, dalam masyarakat masih ada pengklasifikasian berdasarkan status sosial. Ini tampak pada data berikut.

petugas negara yang memanfaatkan opini masyarakat itu untuk memeras kami

*pengemis yang dianggap nista dan
anggota masyarakat berkasta
paling rendah*

Adapun dari segi kolokasi tidak tampak relevansinya dengan temuan di atas karena kata yang paling banyak bersanding dengan masyarakat ialah *suksesku, xin* (Xin Zhu, Taiwan), dan *update* dengan status frekuensi 14.32592.

Kata *rakyat* muncul sebanyak 96 kali. Pengarang memandang *rakyat* memiliki makna yang berposisi dengan pemerintah karena mereka menjadi obyek tindakan pemerintah, baik positif ataupun negatif. Disamping itu, *rakyat* dijadikan sebagai simbol perjuangan dan bahkan perlawanan terhadap hegemoni. Ini tampak pada data berikut.

*dioperasikan dengan baterai tanpa
emisi, memihak rakyat kecil
karena harga karcisnya tidak lebih*

*Pengusuran permukiman rakyat.
Penghisapan kekayaan alam*

*Revolusi harus memenangkan
rakyat jelata, kaum borjuis, feodal,
kita bakar!*

*sejak pemilu, kan! Jangan sok
membela rakyat kecil! Pak Made
kan tangan kanan Bosnya*

*menghambat kita untuk ikut
berjuang jadi pembela rakyat kecil
yang tertindas*

*Andi Makassar sebagai pusat
perjuangan rakyat Parepare,
akulah yang menyiapkan tempat*

*Pekerjaan utama kepala desa
hanyalah menindas rakyat. Yang
menyebalkan, agama dijadikan
sebagai*

*Pak Anggota DPR yang suka
mengelabui rakyat dengan
tampilannya. Tapi aku tahu*

Kolokasi menunjukkan bahwa kata yang paling sering bersanding dengan kata *rakyat* ialah *underbouw, termiskin, tahura* (akronim dari Taman Hutan Rakyat) dengan status frekuensi 13.09851. Temuan ini menguatkan bahwa adanya oposisi antara *rakyat* dan pemerintah/penguasa.

IV. SIMPULAN

Penelitian ini menghasilkan pandangan pengarang dalam karyanya mengenai pemerintah. Pemerintah dipandang sebagai obyek yang negatif karena tindakannya berseberangan dengan *rakyat* dan kurangnya koordinasi antara

pusat dan daerah sehingga memiliki oposisi. Akan tetapi, dalam kondisi tertentu pemerintah memberikan solusi atas kebijakan yang bersinggungan dengan rakyatnya sehingga pemerintah perlu didukung. Demikian pula pemerintah yang direpresentasikan dengan kata *negara*. Dari segi kolokasi ditemukan kata dilindungi paling sering ditemukan bersanding dengan kata *negara*.

Adapun pemerintah yang diwakili oleh kata *presiden, gubernur, walikota, dan bupati* menunjukkan bahwa jabatan-jabatan itu lebih dipandang dari segi personal, bukan sebagai institusi pemerintah sehingga komunikasi interpersonal lebih dititikberatkan. Selain itu, partai politik pengusung masih memiliki keterkaitan dan sangat rentan terjadinya kolusi. Khusus untuk bupati sangat dekat dengan masyarakat pedesaan sehingga rentan dengan penyalahgunaan kekuasaan perihal pengelolaan daerahnya.

Sementara itu, masyarakat dipandang sebagai obyek yang memiliki pola pikir dan nilai kolektif serta kebersamaan yang tinggi. Sedangkan rakyat dipandang sebagai oposisi terhadap pemerintah, klasifikasi sosial, dan simbol perjuangan serta perlawanan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Fajri, M. (2018). THE REPRESENTATION OF A BLASPHEMY PROTEST IN JAKARTA IN LOCAL AND INTERNATIONAL PRESS. *Indonesian Journal of Applied Linguistics*, 7(3), 705-713. doi:<http://dx.doi.org/10.17509/ijal.v7i3.9821>
- Billig, Michael. (2003). "Critical Discourse Analysis and the Rethoric of Critique". (2003). in *Critical Discourse Analysis: Theory and Interdisciplinary*. Weiss, Gilbert and Ruth Wodak (Eds). New York: Palgrave Macmillan.
- Dijk, Teun A. Van. (2001). "Critical Discourse Analysis" dalam *The Handbook of Discourse Analysis*. Deborah Schiffrin, Deborah Tannen, and Heidi E. Hamilton (Eds) Blackwell Publisher Inc. Massachusetts.
- Gee, James Paul. (1999). *An Introduction to Discourse Analysis: Theory and Method*. London: Routledge.
- Haryatmoko. (2017). *Critical Discourse Analysis (Analisis Wacana Kritis): Landasan Teori, Metode dan*

- Penerapannya*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Jorgensen, Marianne dan Louise Phillips. (2002). *Discourse Analysis as Theory and Method*. London: SAGE Publication Ltd.
- Johnstone, Barbara. (2002). *Discourse Analysis*. Massachusetts: Blackwell Publisher Inc.
- Van Dijk, T.A. (1996). "Discourse, Power, and Access", dalam Carmen Rosa Caldas-Coulthard and Malcolm Coulthard, *Text and Practices: Readings in Critical Discourse Analysis*. London/New York: Routledge.